

1.a.2j.cj.1

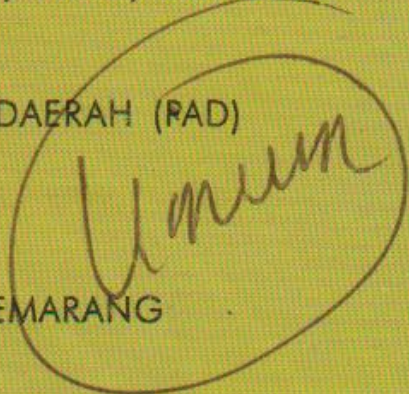
ISSN 0216-2190

JURNAL RISET BISNIS INDONESIA

Vol.1, No.2, Juli 2005

ANALISIS POTENSI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN GROBOGAN
Budhi Cahyono

ANALISIS BRAND SWITCHING
STUDI KASUS PADA KOPERASI "SULTAN AGUNG" SEMARANG
H. Asyhari



PENGARUH COSTUMER VALUE DAN LINGKUNGAN INDIVIDU PASIEN TERHADAP
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PASIEN DALAM MENGGUNAKAN JASA
RUMAH SAKIT
(Studi Kasus Pada RSUD Sunan Kalijaga Demak)
Mulyana

PENGARUH IKLIM PEMBELAJARAN ORGANISASIONAL TERHADAP PERILAKU
MENYIMPANG KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang)
Eny Rahmani & Marno Nugroho

ANTESEDEN KONFLIK PEKERJAAN-KELUARGA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KEPUASAN KERJA
Nurhidayati

ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN ORIENTASI BUDAYA
ORGANISASI TERHADAP INTENSITAS PERENCANAAN STRATEGIK DENGAN
VARIABEL MODERATING KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN
(Studi Kasus di Pemerintah Kota Semarang)
Harry Soelistyono & Indah Susilowati

ANALISIS PENGARUH IKLIM KERJA DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP KEPUASAN
KERJA
(Studi Kasus Kantor Sekretaris Daerah Pemerintah Kab.Demak)
Agus Joko Irianto & Endang Dwiastuti



PROGRAM S2
MAGISTER MANAJEMEN
UNISSULA SEMARANG

ISSN 0216-2190



9 770216 219022

JURNAL RISET BISNIS INDONESIA

Penanggung Jawab : H. Moch Zulfa

Ketua Dewan Redaksi : Ibnu Khajar

Sekretaris Dewan Redaksi : Heru Sulistyono

Anggota Redaksi : 1. H. Miyasto
2. Trenggonowati
3. H. Sahid Sumarno
4. Indah Susilowati
5. Achmad Slamet Waridin
6. Mutamimah
7. Budhi Cahyono
8. H. Asyhari

Alamat Redaksi : **PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN UNISSULA**
Jl.Raya Kaligawe Km.4 Po.Box.1054/SM
Semarang 50112
Telp : 024-6583584 Ext537, 024-6594834
Fax : 024-6582455, 6594834
e-mail : unissulajrb@yahoo.com

JRBI diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi dan karya ilmiah bagi para akademisi, praktisi bisnis, dan pihak-pihak lain yang menaruh minat terhadap masalah ekonomi, bisnis dan manajemen. Untuk menuangkan ide pemikirannya, jurnal ini terbit dua kali dalam setahun (Januari dan Juli). Terbit perdana Januari 2005.

Redaksi menerima naskah yang belum pernah diterbitkan atau dalam proses diterbitkan oleh media lain. Pedoman penulisan naskah untuk **JRBI**, tercantum pada bagian akhir jurnal ini. Surat menyurat mengenai naskah yang akan diterbitkan, langganan dan lainnya dapat dialamatkan ke alamat redaksi.

**JURNAL
RISET
BISNIS
INDONESIA**

DAFTAR ISI

- ANALISIS POTENSI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN GROBOGAN 105 - 116
Budhi Cahyono
- ANALISIS BRAND SWITCHING STUDI KASUS PADA KOPERASI "SULTAN AGUNG" SEMARANG 117 - 126
H. Asyhari
- PENGARUH COSTUMER VALUE DAN LINGKUNGAN INDIVIDU PASIEN TERHADAP PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PASIEN DALAM MENGGUNAKAN JASA RUMAH SAKIT (Studi Kasus Pada RSUD Sunan Kalijaga Demak) 127 - 136
Mulyana
- PENGARUH IKLIM PEMBELAJARAN ORGANISASIONAL TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang) 137 - 152
Eny Rahmani & Marno Nugroho
- ANTESEDEN KONFLIK PEKERJAAN-KELUARGA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN KERJA 153 - 164
Nurhidayati
- ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN ORIENTASI BUDAYA ORGANISASI TERHADAP INTENSITAS PERENCANAAN STRATEGIK DENGAN VARIABEL MODERATING KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN (Studi Kasus di Pemerintah Kota Semarang) 165 - 185
Harry Soelistyono & Indah Susilowati
- ANALISIS PENGARUH IKLIM KERJA DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA (Studi Kasus Kantor Sekretaris Daerah Pemerintah Kab.Demak) 187 - 200
Agus Joko Irianto & Endang Dwiastuti

ANALISIS POTENSI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN GROBOGAN

Budhi Cahyono, SE.MSi
Dosen FE Unissula Semarang

Abstraksi

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis potensi PAD di Kabupaten Grobogan, seiring dengan berlakunya UU No 22 tentang Pemerintahan Daerah dan No 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Data dikumpulkan melalui inventarisasi potensi peningkatan PAD, baik dari laporan dinas-dinas pengelola PAD maupun dari wawancara terfokus dari pihak terkait. Selain itu juga wawancara dengan masyarakat, kaitannya dengan kemampuan mereka membayar pajak. Analisis data dengan menggunakan pendekatan current ratio (CR), rasio pertumbuhan dan tingkat kontribusi.

Berbagai sumber PAD yang memiliki CR tinggi antara lain: pajak bahan galian golongan C, pajak hiburan dan pajak hotel dan restoran. Sedangkan untuk retribusi berturut-turut disumbangkan oleh retribusi pelayanan kesehatan, penggantian biaya cetak dan pemakaian kekayaan daerah. Semua jenis pajak dan sumber-sumber retribusi rata-rata memiliki pertumbuhan dari tahun ke tahun. Sedangkan sumber pajak yang memiliki kontribusi tinggi terhadap PAD antara lain: PPJU, pajak hiburan dan reklame, pajak hotel dan restoran, dan retribusi pelayanan kesehatan, sedangkan kontribusi kecil disumbangkan oleh retribusi pelayanan pemakaman dan bongkar muat. Disamping itu kontribusi yang fluktuatif disumbangkan oleh retribusi pelayanan persampahan dan penggantian biaya cetak.

Kata kunci: PAD, current ratio, rasio pertumbuhan, rasio kontribusi, matrik potensi.

Latar Belakang

Berlakunya otonomi daerah yang dituangkan dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka setiap daerah harus mampu menggali sumber dana pembangunan untuk membiayai pembangunan daerah. Sumber pembiayaan pembangunan bertumpu pada dana dari Pusat yang berupa Dana Perimbangan (DAU, BHP, BHBP, DAK dan Dana Darurat) dan penggalan secara intensif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu berlakunya UU No. 25 tahun 1999, PEMDA perlu memperhatikan aspek finansial dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: prospek PAD, dalam hal ini kontribusinya terhadap APBD maupun perolehan dana perimbangan, yang menyangkut seberapa besar bagian yang diperoleh daerah. UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan pusat memberikan seluas-luasnya wewenang dalam seluruh bidang pemerintahan terhadap daerah, namun untuk hal yang terkait dengan bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain masih menjadi wewenang pemerintah pusat (Bab IV, pasal 7).

Disamping itu dalam pasal 10 juga dinyatakan bahwa daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengindikasikan, bahwa faktor kelestarian lingkungan, terutama terkait dengan kualitas lingkungan harus menjadi prioritas utama kaitannya dengan usaha mengeksploitasi sumber daya di daerah.

Secara umum kondisi keuangan daerah pada saat ini masih lemah dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi. Hal ini disebabkan faktor-faktor antara lain : krisis ekonomi, berkurangnya sumber-sumber PAD sebagai akibat pelaksanaan UU. No. 18 tahun 1997 serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum bekerja secara efisien dan optimal sehingga tidak mampu berkompetisi dengan swasta.

Berlakunya UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, merugikan daerah, karena dengan diberlakukannya UU tersebut, secara umum pendapatan asli daerah (PAD) di daerah kabupaten / kota se Jawa Tengah menurun sebesar Rp 37,4 milyar (Jawa Tengah dalam Angka tahun 2000), sebagai akibat hapusnya 30 jenis pajak daerah kabupaten / kota dan 99 jenis retribusi. UU No. 18 tahun 1997 kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah no. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah no. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasar kondisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa kemampuan PAD dalam memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan sangat strategis dan kritical sekali. Oleh karena itu penggalian potensi PAD merupakan langkah yang sangat penting, khususnya berkaitan dengan

beberapa komponen PAD yang potensial dapat dikembangkan seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan penerimaan lainnya. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam kaitannya dengan otonomi daerah adalah faktor sumber daya manusia (SDM), yang menyangkut pemerataan, kualitas, relevansi, dan efisiensi. Otonomi daerah paling tidak akan memberikan perubahan sikap bagi aparat pemerintah daerah terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga otonomi daerah mengharuskan adanya perubahan budaya bagi SDM pemerintah daerah, dengan pola lama yang mengandalkan penerimaan dari pusat, sedangkan sekarang perlu menentukan cara-cara dalam menggali potensi daerah sebagai sumber pembiayaan.

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu dari 35 kabupaten / kota di propinsi Jawa Tengah. Kemampuan didalam merealisasikan target pendapatan asli daerah pada tahun 1999/2000 hampir mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan sumber dari BPS Jawa Tengah, target PAD tahun 1999/2000 mencapai Rp 8.543.791.000,- sedangkan realisasinya mencapai Rp 8.480.874.000,- (99,26%). Data dari BPS Jawa Tengah ini digunakan sebagai data pendukung awal untuk melakukan analisis selanjutnya.

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi perolehan PAD hampir mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berbagai dinas untuk mencapai target cukup bagus. Dilain pihak peningkatan potensi asli daerah masih prospektif, apabila dapat diinventarisir dan dapat ditemukan potensi-potensi yang baru untuk masing masing sektor.

Apabila dilihat dari pencapaian target setiap tahunnya menunjukkan masih luasnya potensi yang ada, sehingga target tersebut relatif mudah tercapai. Oleh karena itu kita perlu lebih banyak menggali lagi potensi yang ada sehingga dapat ditentukan target yang lebih

realistis dan menunjukkan potensi yang sebenarnya dan sekaligus untuk mengantisipasi kebocoran pada masing masing sektor yang disebabkan target terlalu rendah dibandingkan potensi yang ada.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu mengidentifikasi lebih jauh mengenai Potensi Asli Daerah, yakni seluruh potensi yang dapat digunakan sebagai sumber penerimaan daerah di Kabupaten Grobogan. Penerimaan terutama pada sektor-sektor yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah dan potensi-potensi lain yang selama ini belum tergarap. Pelaksanaan otonomi daerah bukan berarti hanya terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah tetapi aspek masyarakat, perikehidupan, perilaku dan aspirasi masyarakat perlu diperhatikan. Sehingga pelaksanaan otonomi daerah hendaknya didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang menjunjung aspirasi masyarakat, otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, serta dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Ruang lingkup Penyusunan analisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Grobogan meliputi dua substansi : (1) Substansi wilayah meliputi semua obyek pajak, retribusi dan BUMD wilayah Kabupaten Grobogan. (2) Substansi materi, yaitu meliputi analisis potensi PAD di sektor retribusi daerah dan pajak daerah, bagian laba BUMD baik menggunakan data primer maupun data sekunder serta analisis terhadap potensi PAD yang belum tergal.

Maksud dan Tujuan

Penelitian analisis potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Grobogan adalah untuk menggali potensi-potensi PAD yang belum tergarap serta meningkatkan kemampuan komponen PAD yang telah ada dalam memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan. Tujuan dari penyusunan analisis potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Grobogan sebagai berikut

1. Melakukan inventarisasi potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak, retribusi, bagian laba BUMD, baik yang dapat dikembangkan, yang tidak dapat dioperasionalkan meskipun ada Perdanya ataupun sudah ada Perdanya tetapi belum optimal.
2. Melakukan kajian alternatif berbagai sumber-sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan daerah.
3. Menyusun basis data yang tertuang dalam buku potensi Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan oleh Dinas, Badan maupun Instansi dalam proses pengambilan keputusan.

METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian potensi PAD adalah dengan menggunakan metode kualitatif – rasionalistik dan kuantitatif, sedangkan pemaparannya menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan tentang keadaan yang faktual dan akurat tentang masing-masing potensi jenis pendapatan baik pajak maupun retribusi. Secara singkat tahapan analisis yang dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi potensi dan kendala serta peluang peningkatan PAD, baik melalui data laporan dari dinas-dinas / bagian maupun informasi dari wawancara terfokus.
2. Tahapan analisis berikutnya, adalah identifikasi terhadap kemampuan masyarakat membayar obyek pajak / retribusi baru maupun yang belum optimal.
3. Melakukan editing dan tabulasi data kemudian diolah dengan menggunakan program SPSS 10.0 untuk menganalisis statistik deskriptif dan perhitungan besarnya potensi PAD untuk tiap-tiap jenis penerimaan serta menentukan tingkat *collection ratio*, pertumbuhan, kontribusi dan matrik potensinya.
4. Tahap akhir analisis dapat memberikan gambaran dan kesimpulan serta rekomendasi atas potensi obyek pajak, retribusi dan bagian laba BUMD yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan serta memberikan mekanisme pengoptimalan potensi PAD yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai sumber masukan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam upaya meningkatkan peran PAD dalam meningkatkan pembiayaan pembangunan.

Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan pengamatan langsung ke obyek-obyek penelitian. Sedangkan data skunder diperoleh dari BPS, data masing-masing dinas, bagian hukum, Jawa Tengah Dalam Angka, Grobogan Dalam Angka dll. Dalam penelitian ini juga digunakan kuesioner yang ditujukan kepada masing-masing dinas terkait. Adapun jenis data yang diperlukan antara lain: Jenis penerimaan, Dasar pengenaan tarif, Besarnya tarif yang dikenakan, Jumlah obyek penerimaan, Faktor yang mendukung kelancaran penarikan pajak/retribusi, Kendala-kendala yang menghambat penarikan retribusi, Beberapa potensi yang dapat digali masing-masing institusi, Kemampuan membayar pajak/retribusi dari obyek penerima pendapatan, Data kuantitatif obyek penerimaan selama tiga tahun terakhir.

Selanjutnya untuk mendapatkan data secara mendetail pada setiap institusi pengelolaan pendapatan daerah, digunakan berbagai tahapan dan indikator yang sesuai dengan karakteristik masing-masing obyek pajak/retribusi. Secara terperinci mengenai apa yang akan dijadikan dasar untuk mendapatkan data kaitannya dengan karakteristik masing-masing obyek retribusi dan pajak dapat dijabarkan dalam tabel 2. berikut ini.

Metode Analisis Data

1. Analisis *Collection Ratio* (CI)

Analisis ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat efisiensi, baik untuk pendapatan dari sektor pajak maupun retribusi daerah. Perhitungan *collection ratio* diukur dengan rasio antara realisasi dan target yang telah ditetapkan oleh masing-masing dinas/instansi/badan/kantor lingkungan Kabupaten Grobogan. Nilai *collection ratio* dikatakan baik apabila minimal 100%.

2. Analisis Tingkat Pertumbuhan

Analisis tingkat pertumbuhan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi dalam beberapa tahun pengamatan. Untuk menilai perkembangan sektor pajak dan retribusi dilakukan dengan membandingkan jumlah masing-masing pajak dan retribusi dengan jumlah total pendapatan pajak dan retribusi. Tingkat pertumbuhan ini akan memberikan gambaran bahwa suatu obyek pajak atau retribusi memiliki pertumbuhan yang stagnan, naik atau menurun.

3. Analisis Tingkat Sumbangan

Tingkat sumbangan masing-masing jenis pajak dan retribusi akan memberikan gambaran berapa tingkat kontribusi yang diberikan terhadap total pendapatan dari sektor pajak dan retribusi. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai sektor pajak/retribusi yang memberikan sumbangan yang paling besar maupun yang sumbangannya kecil. Besarnya tingkat sumbangan belum mencerminkan bahwa pajak dan retribusi memiliki potensi yang baik dalam menyumbang PAD. Pengukuran suatu obyek pajak atau retribusi dikatakan memiliki kontribusi yang baik, apabila memiliki kontribusi diatas rata-rata dari seluruh obyek yang diteliti.

4. Analisis Matrik Potensi

Analisis matrik potensi dimaksudkan untuk mengetahui potensi masing-masing pajak dan retribusi daerah. Potensi masing-masing pajak dan retribusi dapat dihitung dengan melihat tingkat pertumbuhannya dan tingkat kontribusinya terhadap total pendapatan. Penggolongan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

Prima : tingkat pertumbuhan dan proporsinya diatas rata- rata.

Potensial : tingkat pertumbuhan kurang dari rata-rata, namun proporsinya lebih dari rata-rata

Berkembang : tingkat pertumbuhannya lebih dari rata-rata, namun proporsinya kurang dari rata-rata

Terbelakang : tingkat pertumbuhann dan proporsinya kurang dari rata-rata.

HASIL PENELITIAN

Kondisi PAD

Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam studi ini difokuskan pada pendapatan yang berasal dari retribusi, pajak daerah dan bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mendasarkan pada data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Grobogan tahun 2000 sampai tahun 2002, jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak meliputi enam jenis, yakni: pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak bahan galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah (ABT) dan air permukaan (AP). Sedangkan sumber pendapatan dari retribusi 23 macam yang dikelola oleh masing-masing badan, dinas dan kantor.

Mendasarkan pada data BPKD tahun 2002, rencana pendapatan asli daerah Kabupaten Grobogan yang berasal dari pajak adalah Rp 3.187.680.000, dan dari sektor retribusi berjumlah Rp 13.497.761.000, sehingga jumlah target totalnya adalah Rp 16.685.441.000,- Besarnya realisasi pendapatan daerah sampai bulan Mei 2002 untuk pajak adalah Rp 1.347.954.355 (42,286 %) dan untuk retribusi sebesar Rp 6.248.837.702,25 atau (46,295 %). Mendasarkan pada data realisasi sampai bulan Mei tersebut, secara umum dapat kita simpulkan bahwa pencapaian realisasi pajak dan retribusi cukup baik dan diharapkan tentunya sampai pada akhir tahun akan mencapai target.

Sumber-sumber PAD

Sumber-sumber PAD dalam studi yang dilakukan meliputi sumber yang berasal dari pajak dan retribusi. Kedua sumber ini merupakan sumber pendapatan yang memiliki kecenderungan dapat memunculkan potensi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan wilayah yang bersangkutan. Secara terperinci kedua sumber tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Sumber-sumber PAD Kab. Grobogan

No	Pajak	No	Retribusi
1	Hotel dan restoran	1	Pelayanan kesehatan
2	Hiburan	2	Pelyn.kebersihan
3	Reklame	3	Pengg.cetak KTP/Akte
4	Penerangan Jl. Umum	4	Pelayanan pemakaman
5	Bahan galian gol. C	5	Parkir tepi jalan umum
6	Pemanfaatan ABT & AP	6	Pasar
		7	Pengujian kend. Bermotor
		8	Pemk. Kekayaan daerah
		9	Terminal
		10	Tempat khusus parkir
		11	Penyedotan kakus
		12	RPH
		13	Penebangan kayu milik rakyat
		14	Tempat OR dan rekreasi
		15	Penj. Produksi daerah
		16	Pemb. Hak atas tanah
		17	IMB
		18	Ijin TPM berakohol
		19	Ijin gangguan
		20	Ijin trayek
		21	Ijin bongkar muat barang
		22	Ijin dispens, trayek Jl. Kota
		23	Tera

Dinas-dinas Pengelola Keuangan Daerah

Di Kabupaten Grobogan pengelolaan pendapatan asli daerah dilakukan oleh berbagai institusi, yang terdiri dari dinas, badan dan kantor. Menurut pemahaman peneliti dengan mendasarkan pada berbagai retribusi dan pajak yang di tarik, maka institusi-institusi yang terkait dengan pendapatan asli daerah adalah : Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Dinas PU Jalan dan Jembatan, Dinas PU Pengairan, Cipta Karya dan Kebersihan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kantor Perijinan Daerah, Kantor Pengelola Pasar., Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusda Purwa Arta, Perusda Purwa Aksara, Perusda Purwa Motor, Perusda Pakan Ternak, BPR BKK.

Analisis *Collection Ratio* (CR)

Mendasarkan pada perhitungan CR dalam jangka waktu tahun 2000 sampai 2002, hasilnya adalah sebagai berikut :

Untuk sektor pajak, urutan tingkat collection ratio adalah sebagai berikut : Pajak bahan galian golongan C, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan umum, Pajak pemanfaatan ABT & AP, Pajak Hotel dan restoran. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat CR untuk sektor pajak sebanyak 70% mempunyai CR yang lebih dari 100%.

Untuk sektor retribusi, yang memiliki CR 100% atau lebih besar adalah :Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi penggantian cetak, Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi tempat parkir, Retribusi penebangan kayu milik rakyat, Retribusi IMB, Retribusi ijin gangguan. Sedangkan sektor retribusi yang memiliki CR kurang dari 100% antara lain : Retribusi pelayanan persampahan, Retribusi pelayanan pemakaman , Retribusi parkir tepi jalan, Retribusi pasar, Retribusi penyedotan kakus, Retribusi RPH, Retribusi tempat olah raga dan rekreasi, Retribusi penjualan produksi daerah, Retribusi pemb. Hak atas tanah, Retribusi TPM beralkohol, Retribusi ijin trayek, Retribusi bongkar muat, Retribusi ijin dispensasi trayek jalan kota

Analisis Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak dan retribusi. Tingkat pertumbuhan dalam pajak dan retribusi mengindikasikan bahwa pendapatan sektor pajak dan retribusi mempunyai potensi yang bagus. Dilain pihak apabila pajak dan retribusi, walaupun memiliki kontribusi cukup besar, namun tingkat pertumbuhannya tidak ada, memberikan indikasi yang kurang prospektif, sehingga perlu dilakukan tindakan ekstensifikasi. Berdasarkan pada perhitungan tingkat pertumbuhan, maka sektor pajak yang memiliki tingkat pertumbuhan adalah semua jenis penerimaan dari sektor pajak.

Sedangkan untuk sektor retribusi, semua juga memiliki pertumbuhan yang positif, kecuali retribusi minuman beralkohol. Tingkat pertumbuhan yang positif dapat juga diindikasikan bahwa target yang ditetapkan ada beberapa kemungkinan, misalnya efektivitas penarikan yang cukup baik atau besarnya target yang terlalu rendah.

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi dimaksudkan untuk mengetahui besarnya (%) sumbangan masing-masing obyek pajak dan retribusi terhadap total masing-masing pajak dan retribusi. Mendasarkan pada perhitungan kontribusimaka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kontribusi untuk sektor pajak yang paling besar adalah penerimaan pajak penerangan jalan (89,29%), akan tetapi bersifat fluktuatif. Sedangkan yang kontribusinya paling kecil adalah pajak galian golongan C, sebesar (1,11%), akan tetapi tingkat kontribusinya setiap tahun mengalami peningkatan.
2. Pajak hiburan dan reklame mempunyai tingkat kontribusi yang fluktuatif, karena kedua jenis pajak ini memiliki kecenderungan bersifat insidental.
3. Pajak hotel restoran, dan pajak ABT & AP mengalami kontribusi yang menurun dari tahun 2000 sampai 2002. hal ini mengindikasikan adanya ketidakefektifan dalam penarikan.

Untuk sektor retribusi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kontribusi terbesar adalah retribusi pelayanan kesehatan (73,6%), tetapi besarnya kontribusi bersifat fluktuatif, berarti sumber pendapatan ini tergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Sektor retribusi yang memiliki kontribusi kecil (bekisar antara 0,01% – 0,07%), antara lain: retribusi pelayanan pemakanan, retribusi bongkar muat, pembayaran hak atas tanah, penjualan produksi daerah, ijin trayek, ijin dispensasi jalan dan penyedotan kakus.
3. Jenis retribusi yang kontribusinya fluktuatif, antara lain: pelayanan persampahan, penggantian biaya cetak

Analisis Matrik Potensi

Berdasarkan pada perhitungan matrik potensi, maka untuk sektor pajak dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak pemanfaatan Galian C memiliki kriteria prima.
Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan galian C mengalami pertumbuhan penerimaan diatas rata-rata dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan diatas rata-rata peningkatan kontribusi sektor pajak lainnya. Kondisi ini harus dipertahankan sebagai upaya peningkatan potensi PAD
2. Pajak Penerangan Jalan Umum memiliki kriteria potensial.
Hal ini menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan umum mengalami pertumbuhan hanya saja pertumbuhannya masih dibawah rata-rata pertumbuhan dari sektor pajak daerah, akan tetapi kontribusi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi ini harus dilakukan upaya peningkatan dengan melakukan koordinasi dengan pihak pengelola pendapatan sektor penerangan jalan yang dilakukan instansi diluar pemerintah kabupaten yang relatif *uncontrolable*.
3. Pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak pemanfaatan ABT & AP mempunyai kriteria terbelakang.
Hal ini menunjukkan bahwa dari keempat sumber penerimaan pajak daerah tersebut pertumbuhan setiap tahunnya dibawah rata-rata pertumbuhan dari sektor pajak daerah dan kontribusi setiap tahunnya juga dibawah rata-rata kontribusi sektor pajak bahkan

mengalami penurunan kontribusi terhadap PAD dari sektor pajak. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan pertumbuhan maupun kontribusinya.

Sedangkan untuk sektor retribusi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Retribusi yang kriteria A, yaitu : Penggantian Biaya cetak KTP dan Akte.
Hal ini menunjukkan penerimaan retribusi penggantian biaya cetak KTP/Akte setiap tahunnya pertumbuhan setiap tahunnya mengalami peningkatan diatas rata-rata pertumbuhan dari retribusi dan kontribusi terhadap PAD dari retribusi setiap tahunnya mengalami peningkatan diatas rata-rata kontribusi sektor retribusi lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan kondisi ini supaya dapat meningkatkan potensi PAD dari sektor retribusi.
2. Retribusi yang memiliki kriteria potensial antara lain : retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi pasar mengalami pertumbuhan hanya saja pertumbuhannya masih dibawah rata-rata pertumbuhan dari sektor retribusi daerah, akan tetapi kontribusi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi ini harus dilakukan upaya peningkatan.
3. Retribusi yang memiliki kriteria berkembang adalah retribusi pelayanan pemakaman.
Hal ini menunjukkan bahwa retribusi pemakaman mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibanding rata-rata retribusi secara keseluruhan, akan tetapi pertumbuhan kontribusinya lebih rendah dibandingkan rata-rata peningkatan kontribusi retribusi secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan objek retribusi agar kontribusinya mengalami peningkatan.
4. Sedangkan retribusi yang memiliki kriteria terbelakang antara lain : Retribusi pelayanan persampahan, Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi terminal, Retribusi tempat khusus parkir, Retribusi peyedotan kakus, Retribusi RPH, Retribusi penebangan kayu milik rakyat, Retribusi tempat olah raga dan rekreasi, Retribusi penjualan produksi daerah, Retribusi pembagian hak atas tanah, Retribusi IMB, Retribusi ijin TPM beralkohol, Retribusi ijin bongkar muat barang, Retribusi dispensasi trayek jalan kota, Retribusi tera.
Hal ini menunjukkan bahwa dari kesembilan belas sumber penerimaan retribusi daerah tersebut pertumbuhan setiap tahunnya dibawah rata-rata pertumbuhan dari sektor retribusi daerah dan kontribusi setiap tahunnya juga dibawah rata-rata kontribusi sektor retribusi bahkan mengalami penurunan kontribusi terhadap PAD dari sektor retribusi. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan pertumbuhan maupun kontribusinya.

Adapun Upaya peningkatan potensi pajak dan retribusi untuk sumber-sumber PAD yang potensial dapat dilakukan sebagai berikut :

Pajak Hotel dan Restoran

Penerimaan pajak hotel dan restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya relatif kecil dibandingkan dengan rata-rata peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Akan tetapi kontribusinya terhadap total penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami penurunan. Apabila dilihat dari *collection ratio* (CR) setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidak efektifan dalam penarikan atau potensi pada sektor tersebut memang sudah maksimal. Apabila dilihat dari keunggulan dan peluang dari sektor hotel restoran sebetulnya cukup potensial, terutama dilihat dari kondisi ekonomi dan peluangnya cukup besar karena jumlah hotel yang tidak begitu banyak. Dari kondisi tersebut, maka rendahnya pertumbuhan serta penurunan kontribusi dari sektor pajak hotel dan restoran lebih disebabkan oleh belum optimalnya penanganan pajak hotel dan restoran. Langkah yang perlu dilakukan untuk peningkatan :

1. Melakukan pendataan mengenai sarana yang dimiliki hotel beserta tingkat hunian (BOR) dalam periode tertentu.
2. Standarisasi form penerimaan hotel yang dikeluarkan oleh BPKD
3. Melakukan pendataan penjual makanan (restoran) yang relatif cukup ramai.
4. Standarisasi form penerimaan restoran yang dikeluarkan BPKD.
5. Mewajibkan bagi restoran untuk melakukan ijin usaha dengan berbagai kemudahan dan sosialisasi atas konsekuensi diperolehnya ijin dan konsekuensi apabila tidak melakukan ijin.

Pajak Reklame

Pertumbuhan positif tapi dibawah rata-rata pertumbuhan keseluruhan pertumbuhan dari total pajak, dan pertumbuhan kontribusi setiap tahunnya mengalami penurunan. Apabila dilihat dari $CR > 1$, hal ini menunjukkan target yang ditentukan terlalu konservatif karena kemungkinan objek pajak reklame itu sendiri juga lebih bersifat insidental (fluktuatif).

Upaya peningkatan dilakukan dengan mendata objek pajak reklame yang lebih bersifat permanen (rutin berulang-ulang pada periode tertentu) dan objek pajak reklame insidental (berdasarkan kriteria tertentu). Disamping itu bisa diusahakan juga dengan melakukan ekstensifikasi seperti:

1. Pengenaan pajak atas papan nama dokter, dan jasa-jasa sejenisnya
2. Identifikasi tempat-tempat strategis untuk didirikan baliho reklame.

Pajak Bahan Galian C

Pertumbuhan positif tapi di atas rata-rata pertumbuhan keseluruhan pertumbuhan dari total pajak, dan pertumbuhan kontribusi setiap tahunnya mengalami peningkatan di atas rata-rata pertumbuhan pajak secara keseluruhan. Apabila dilihat dari $CR > 1$, hal ini menunjukkan target penerimaan selama ini sangat bersifat konservatif, oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi potensi riil di lapangan terhadap pengusaha yang mendapatkan manfaat ekonomis dari bahan galian C, dengan cara membuat portal pada pintu keluar sentra bahan galian C.

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun kenaikannya relatif kecil dibandingkan rata-rata pertumbuhan retribusi secara keseluruhan dan pertumbuhan kontribusi setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, meskipun relatif kecil dibanding rata-rata peningkatan kontribusi retribusi. Sedangkan, dilihat dari tingkat *Collection Ratio* (CR) sebesar = 1 (satu), maka penarikan retribusi selama ini sudah cukup efektif dan optimal.

Langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah upaya ekstensifikasi melalui antara lain: mendirikan semacam Pusat Pelayanan Laboratorium Kesehatan masyarakat, mengeluarkan rekomendasi dan sertifikasi Kesehatan.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pertumbuhan penerimaan retribusi persampahan/kebersihan ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun kenaikannya relatif kecil dibandingkan rata-rata pertumbuhan retribusi secara keseluruhan. Pertumbuhan kontribusi setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, meskipun relatif kecil dibanding rata-rata peningkatan kontribusi dari keseluruhan retribusi. Sedangkan, dilihat dari tingkat *Collection Ratio* (CR) sebesar < 1 (0,94), maka penarikan retribusi selama ini kurang efektif dan optimal.

Langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah upaya intensifikasi terhadap objek retribusi sampah dengan berdasarkan PERDA No.7 Tahun 2001, yang meliputi objek: sekolah, ruko, restoran, show room kendaraan bermotor, hotel, losmen, SPBU, dan Industri. Estimasi potensi nilai retribusi yang bisa diperoleh sekitar Rp. 109.054.000,- Potensi ini didasarkan perhitungan jumlah wajib retribusi seperti yang terdapat dalam PERDA No.7 Tahun 2001, yakni mengalikan jumlah objek pajak dengan tarif yang ditentukan.

Retribusi Penggantian Cetak KTP/AKTA

Pertumbuhan penerimaan retribusi penggantian cetak KTP/AKTA ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan kenaikannya lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan retribusi secara keseluruhan. Pertumbuhan kontribusi setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, dan lebih dibanding rata-rata peningkatan kontribusi dari keseluruhan retribusi. Sedangkan, dilihat dari tingkat *Collection Ratio* (CR) sebesar > 1 (1,04), maka penarikan retribusi selama ini sudah cukup efektif dan optimal.

Langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah perlu dilakukan upaya ekstensifikasi terhadap objek retribusi jenis ini dengan :

- a. Menginventarisir kebutuhan Kartu Keluarga (KK) dari banyaknya angka perkawinan, dengan estimasi sebesar 14.833 pasangan pada tahun 2003.
- b. Menginventarisir usia wajib KTP yakni usia penduduk antara 17 s/d 60 tahun, yang diestimasikan sebesar 840.929 orang, dengan umur KTP 3 tahun, maka prediksi kebutuhan KTP sebesar sepertiganya.
- c. Memberdayakan fungsi KTP, artinya setiap aktivitas yang berhubungan dengan pemerintahan (kelurahan, kecamatan dan kabupaten) diwajibkan menggunakan KTP, sehingga merangsang masyarakat untuk memiliki KTP.

- d. Menginventarisasi jumlah rumah yang diestimasi melalui jumlah penduduk dibagi lima dibagi lagi 2, sebagai dasar untuk mengetahui potensi penomoran rumah. Umur penomoran rumah diberi jangka waktu tertentu.

Retribusi Pasar

Pertumbuhan penerimaan retribusi pasar ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun kenaikannya relatif kecil dibandingkan rata-rata pertumbuhan retribusi secara keseluruhan. Pertumbuhan kontribusi setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, meskipun relatif kecil dibanding rata-rata peningkatan kontribusi dari keseluruhan retribusi. Sedangkan, dilihat dari tingkat *Collection Ratio* (CR) sebesar < 1 (0,95), maka penarikan retribusi selama ini sudah cukup kurang efektif dan optimal.

Langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah melakukan upaya intensifikasi terhadap objek retribusi pasar, misalnya dengan menginventarisir sumber retribusi seperti: jumlah kios dan pedagang lemprak.

Retribusi Terminal

Pertumbuhan penerimaan retribusi terminal ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun kenaikannya lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan retribusi secara keseluruhan. Namun pertumbuhan kontribusi setiap tahunnya mengalami penurunan. Sedangkan, dilihat dari tingkat *Collection Ratio* (CR) sebesar $= 1$, maka penarikan retribusi selama ini sudah cukup efektif dan optimal.

Langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah perlu dilakukan upaya intensifikasi terhadap objek retribusi terminal, lewat upaya: pemberdayaan terminal yang selama tidak efektif beroperasi, penerapan sanksi bagi kendaraan yang tidak masuk terminal.

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pertumbuhan penerimaan retribusi tempat parkir khusus ini setiap tahunnya mengalami penurunan. Sedangkan pertumbuhan kontribusi setiap tahunnya juga mengalami penurunan. Dilihat dari tingkat *Collection Ratio* (CR) sebesar > 1 (1,02), maka penarikan retribusi tempat khusus parkir selama ini sudah cukup efektif dan optimal.

Langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah perlu dilakukan ekstensifikasi terhadap objek retribusi tempat parkir khusus lewat upaya inventarisir potensi sebenarnya dari objek retribusi ini.

Retribusi Tempat Olah Raga dan Rekreasi

Pertumbuhan penerimaan retribusi Tempat Olah Raga dan Rekreasi ini setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang negatif. Sedangkan pertumbuhan kontribusi setiap tahunnya juga mengalami penurunan. Dilihat dari tingkat *Collection Ratio* (CR) sebesar < 1 (0,98), maka penarikan retribusi tempat olah raga dan rekreasi selama ini kurang efektif dan optimal.

Langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah upaya intensifikasi terhadap objek retribusi tempat olah raga dan rekreasi, dengan cara melengkapi tempat olah raga dan rekreasi yang telah ada dengan fasilitas-fasilitas yang lebih menarik.

Perusda Purwa Aksara

Dilihat dari proporsi rasio kontribusinya Perusda Purwa Aksara yang memiliki tiga unit bisnis, yakni Unit Percetakan, Unit Perbengkelan dan Unit Perdagangan Umum, memiliki proporsi kontribusi yang semakin menurun. Sedangkan dari tingkat pertumbuhannya, memiliki pertumbuhan pendapatan yang fluktuatif. Langkah kedepan yang perlu dilakukan adalah upaya ekstensifikasi, dengan jalan sebagai berikut :

- a. Untuk Unit Percetakan, sebagai Perusda disamping melayani kantor pemerintah, hendaknya juga memperluas jangkauan pemasarannya dan melakukan terobosan unit-unit bisnis yang lain.
- b. Untuk Unit Perbengkelan, lebih menekankan pada penciptaan harga yang bersaing dengan bengkel-bengkel lain dan membenahan lingkungan bengkel yang cenderung tidak teratur, banyak dokar, becak dan bau yang tidak sedap.
- c. Untuk Unit Perdagangan Umum, disamping sudah memiliki pasaran tetap, yakni kantor-kantor pemerintah, diusahakan juga porsi pemasaran kepada masyarakat umum juga ditambah.

Perusda Pakan Ternak

Perusda Pakan Ternak merupakan perusahaan baru, sehingga belum dapat dimunculkan tingkat kontribusi pendapatan dan tingkat pertumbuhan pendapatannya. Namun dalam analisis kami menggunakan analisis *Product Life Cycle* (PLC), yakni sebagai usaha baru, perlu memperkenalkan produknya kepada masyarakat konsumen mengenai produk yang dihasilkan. Disamping itu dukungan aktivitas promosi yang baik akan memperkenalkan perusahaan kepada konsumennya. Perlu juga dilakukan diversifikasi produk untuk meningkatkan pendapatan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

PDAM pada tahun 1999 sampai tahun 2002 tidak dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah daerah sebesar 55% dari laba bersih (Perda No 7 tahun 1986), karena pada tahun tersebut pendapatan PDAM digunakan untuk membayar hutang dari Depkeu sebesar 4,7 miliar. Dalam penelitian ini mendasarkan pada data tahun 1996 sampai tahun 1998, dan dapat dilihat bahwa proporsi kontribusinya mengalami penurunan, sedangkan proporsi pertumbuhannya mengalami kenaikan.

Langkah yang dapat diambil oleh PDAM, yakni upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, karena sebanyak 61 karyawan masih memiliki status kontrak. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan menambah cabang baru, selain 13 kecamatan yang sudah dilayani. Penambahan cabang juga harus memperhatikan sumber air di daerah setempat.

Kesimpulan

Mendasarkan pada analisis sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata penerimaan pajak dan retribusi mengalami pertumbuhan.
2. Kontribusi pajak dan retribusi masih didominasi oleh pajak penerangan jalan umum dan retribusi pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan belum meratanya sumbangan masing-masing sektor pajak dan retribusi terhadap PAD, sehingga perlu perhatian terhadap obyek

pajak dan retribusi lain, terutama yang memiliki pertumbuhan penerimaan dan pertumbuhan kontribusi.

3. Secara umum realisasi penarikan penerimaan terhadap target sudah efisien.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diusulkan sehubungan dengan kajian potensi sumber-sumber PAD, difokuskan pada kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi difokuskan antara lain pada: pemberian sanksi terhadap obyek pajak yang belum memenuhi ketentuan (hotel dan restoran), perlunya pendataan ulang terhadap obyek-obyek retribusi yang potensial, dan identifikasi tempat-tempat strategis.

Sedangkan untuk kebijakan ekstensifikasi difokuskan pada berbagai usulan Raperda untuk papan nama dokter, pusat pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, sertifikasi kesehatan (dinas kesehatan) dan perluasan retribusi sampah, pembentukan kios mandiri (dinas pasar), perlunya pengadaan industri makanan ternak (perusda pakan ternak), perluasan jaringan pipanisasi (PDAM).

DAFTAR PUSTAKA

1. BAPPEDA (2000),” *Laporan Akhir Evaluasi dan Analisa Keadaan Daerah Propinsi Jawa Tengah,*”
2. Biro Pusat Statistik (2000),” *Jawa Tengah Dalam Angka 2000,*”
3. Badan Pusat Statistik (2001),” *Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2001.*
4. BPKD (2000 sampai 2002); *Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2000 sampai tahun 2002.*
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang *Pajak Daerah.*
6. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia (Prof.Drs.HAW Widjaja).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah.*
8. Sjöholm Fredrik (1999),” *Productivity Growth in Indonesia: The Role of Regional Characteristics and Direct Foreign Investment,*” *Economic Development and Cultural Change,* by the University of Chicago.
9. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.